PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP BELANJA DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR

Muhammad Wahyu Asnafi
Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Email: muhammadwahyuasnafi10@gmail.com

Eka Nur Rofik
Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Email: ekanurrofik08@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2019-2023. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Data yang dianalisis berupa data sekunder yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur. Populasi mencakup seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dengan sampel sebanyak 33 kabupaten/kota selama lima tahun pengamatan sehingga menghasilkan total 165 observasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan aplikasi SPSS Statistic versi 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, pajak daerah, retribusi daerah, dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Secara parsial, pajak daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan retribusi daerah berpengaruh negatif namun tidak signifikan. Sementara itu, jumlah penduduk terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,929 menunjukkan bahwa 92,9% variasi belanja daerah dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen tersebut.

Kata Kunci: *Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Jumlah Penduduk, Belanja Daerah, Desentralisasi Fiskal*

ABSTRACT

This study aims to analyze the effects of local taxes, local user charges, and population size on regional expenditure in regencies and municipalities across East Java Province during the 2019–2023 period. This study employs a quantitative approach with an associative research design. The data analyzed are secondary data obtained from the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) and the Central Statistics Agency (BPS) of East Java Province. The population comprises all regencies and municipalities in East Java Province, with a sample of 33 regencies and municipalities observed over five years, resulting in a total of 165 observations. The sampling technique employed is purposive sampling. Data analysis was conducted using multiple linear regression with the assistance of SPSS Statistics version 27. The results indicate that, simultaneously, local taxes, local user charges, and population size have a significant effect on regional expenditure. Partially, local taxes have a positive and significant effect on regional expenditure, while local user charges have a negative but insignificant effect. Meanwhile, population size has a positive and significant effect on regional expenditure. The coefficient of determination (R^2) of 0.929 indicates that 92.9% of the variation in regional expenditure can be explained by the three independent variables.

Keywords: *Local Taxes, Local User Charges, Population Size, Regional Expenditure, Fiscal Decentralization*

PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal mendorong pemerintah daerah untuk mengelola keuangan secara mandiri sebagai bagian dari penguatan otonomi daerah (Ambya, 2023). Dalam kerangka tersebut, belanja daerah berperan sebagai instrumen utama pembiayaan pembangunan dan penyediaan layanan publik. Tingkat belanja tidak hanya ditentukan oleh transfer dari pemerintah pusat, tetapi juga oleh kapasitas daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang bersumber dari pajak dan retribusi. Di sisi lain, pertumbuhan jumlah penduduk meningkatkan kebutuhan pelayanan publik sehingga berdampak pada besaran pengeluaran daerah.

Provinsi Jawa Timur dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik ekonomi dan sosial yang beragam, terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota dengan tingkat kapasitas fiskal dan beban penduduk berbeda-beda. Periode penelitian 2019-2023 dipilih karena mencakup fase sebelum, saat, dan setelah pandemi COVID-19 yang menyebabkan fluktuasi signifikan pada penerimaan daerah maupun belanja publik.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Penelitian Yohana Fransiska Br Sembiring dkk. (2022) menemukan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja daerah di Sumatera Utara. Namun, Vellia Febriani dan Titik Mildawati (2021) menemukan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah di Kota Surabaya. Penelitian Dahliah (2022) menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah di Kota Makassar. Perbedaan temuan tersebut mengindikasikan bahwa pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah belum menunjukkan hasil yang konsisten.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan jumlah penduduk secara simultan terhadap belanja daerah; (2) mengetahui pengaruh pajak daerah secara parsial terhadap belanja daerah; (3) mengetahui pengaruh retribusi daerah secara parsial terhadap belanja daerah; dan (4) mengetahui pengaruh jumlah penduduk secara parsial terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2019-2023.

KAJIAN TEORI

Teori Fiscal Federalism

Teori Fiscal Federalism yang dikembangkan oleh Richard A. Musgrave (1959) dan Wallace E. Oates (1972) menjelaskan pembagian kewenangan, fungsi, dan tanggung jawab keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam negara yang menerapkan desentralisasi. Musgrave menyatakan bahwa pemerintah memiliki tiga fungsi utama: fungsi alokasi (penyediaan barang dan jasa publik), fungsi distribusi (pemerataan kesejahteraan), dan fungsi stabilisasi (menjaga stabilitas ekonomi makro). Oates menambahkan bahwa pemerintah daerah memiliki keunggulan informasi dalam memahami preferensi dan kebutuhan masyarakat lokal, sehingga pelimpahan kewenangan fiskal dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik (Matos, 2018).

Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pungutan wajib yang diterapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan hukum, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022). Pajak daerah merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif stabil dan berkontribusi besar terhadap ruang fiskal pemerintah daerah.

Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan oleh pemerintah daerah sebagai kompensasi atas layanan atau izin khusus yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau entitas tertentu (Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023). Berbeda dengan pajak, retribusi memberikan imbalan langsung kepada pembayar dan bersifat fluktuatif karena tergantung pada intensitas penggunaan layanan publik.

Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk merupakan indikator demografis yang mencerminkan besarnya populasi yang menjadi target pelayanan publik. Pertumbuhan penduduk meningkatkan kebutuhan terhadap berbagai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan sosial lainnya (Badan Pusat Statistik, 2024). Semakin besar populasi suatu daerah, semakin besar pula tanggung jawab pembiayaan yang ditanggung pemerintah daerah.

Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang diarahkan untuk memenuhi kepentingan publik (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019). Belanja daerah mencerminkan komitmen nyata pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup melalui berbagai program pembangunan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara dua variabel atau lebih serta menilai ada atau tidaknya pengaruh di antara variabel-variabel tersebut (Sugiyono, 2018).

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur yang berjumlah 38 daerah (29 kabupaten dan 9 kota). Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria: (1) kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur; dan (2) mengeluarkan kabupaten/kota dengan nilai belanja daerah yang jauh lebih tinggi dari mayoritas daerah lain untuk menghindari bias. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh sampel sebanyak 33 kabupaten/kota dengan periode pengamatan 2019-2023, sehingga total observasi sebanyak 165 data.

Sumber Data dan Variabel Penelitian

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari:

a) **Variabel Dependen (Y):** Belanja Daerah
b) **Variabel Independen (X1):** Pajak Daerah
c) **Variabel Independen (X2):** Retribusi Daerah
d) **Variabel Independen (X3):** Jumlah Penduduk

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan: (1) analisis statistik deskriptif; (2) uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi); (3) analisis regresi linier berganda; dan (4) uji hipotesis (uji F, uji t, dan koefisien determinasi R^2). Pengolahan data menggunakan SPSS Statistic versi 27.

Model regresi yang digunakan adalah:

$$\mathbf{Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon}$$

Keterangan:

a) Y = Belanja Daerah
b) X_1 = Pajak Daerah

c) X_2 = Retribusi Daerah
d) X_3 = Jumlah Penduduk
e) α = Konstanta
f) $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi
g) ε = Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, diperoleh gambaran umum data penelitian sebagai berikut:

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Daerah	165	23.720.000.000	793.320.000.000	143.383.212.121,21	151.467.975.629,995
Retribusi Daerah	165	1.740.000.000	90.870.000.000	22.327.151.515,15	15.225.996.054,809
Jumlah Penduduk	165	129.014	1.744.814	886.247,21	443.587,256
Belanja Daerah	165	804.410.000.000	3.733.510.000.000	2.119.910.121.212,12	715.021.562.189,789

Sumber: Data Diolah, 2025

Nilai standar deviasi pajak daerah sebesar 151.467.975.629,995 yang melebihi nilai rata-rata menunjukkan tingkat penyebaran data yang tinggi, mengindikasikan adanya perbedaan signifikan antar kabupaten/kota dalam pengumpulan pajak. Hal ini mencerminkan ketidakseragaman kemampuan fiskal daerah yang dipengaruhi oleh variasi aktivitas ekonomi dan karakteristik wilayah. Sementara itu, standar deviasi belanja daerah (715.021.562.189,789) lebih kecil dibandingkan mean (2.119.910.121.212,12), menunjukkan data belanja daerah cenderung homogen.

Uji Asumsi Klasik

Hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 > 0,05, yang berarti residual dalam model regresi berdistribusi normal. Uji multikolinearitas menunjukkan semua variabel memiliki nilai Tolerance > 0,10 dan VIF < 10, sehingga model terbebas dari multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas dengan metode Glejser menunjukkan nilai signifikansi seluruh variabel > 0,05, yang berarti model bebas dari heteroskedastisitas. Uji autokorelasi dengan Durbin-Watson menghasilkan nilai 1,908, yang berada di antara dU (1,7825) dan 4-dU (2,2175), sehingga tidak terjadi autokorelasi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil analisis regresi linier berganda menghasilkan persamaan:

$$\mathbf{Y = 752.840.003.888,916 + 0,780X_1 - 0,494X_2 + 1.428.794,933X_3 + \varepsilon}$$

Interpretasi dari persamaan tersebut adalah:

1. Konstanta sebesar 752.840.003.888,916 menunjukkan bahwa jika semua variabel independen bernilai nol, belanja daerah diperkirakan sebesar 752.840.003.888,916.
2. Koefisien pajak daerah (0,780) menunjukkan setiap peningkatan satu satuan penerimaan pajak daerah akan meningkatkan belanja daerah sebesar 0,780 satuan.

3. Koefisien retribusi daerah (-0,494) menunjukkan setiap peningkatan satu satuan penerimaan retribusi daerah diikuti oleh penurunan belanja daerah sebesar 0,494 satuan.
4. Koefisien jumlah penduduk (1.428.794,933) menunjukkan setiap penambahan satu jiwa penduduk akan meningkatkan belanja daerah sebesar 1.428.794,933.

Uji Hipotesis

Uji F (Simultan): Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 704,777 dengan signifikansi 0,000 < 0,05. Hal ini berarti pajak daerah, retribusi daerah, dan jumlah penduduk secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Temuan ini sejalan dengan teori Fiscal Federalism yang menyatakan bahwa tingkat belanja daerah ditentukan oleh interaksi antara kapasitas fiskal (pajak dan retribusi) dan kebutuhan fiskal (jumlah penduduk) pemerintah daerah (Oates, 1972).

Uji t (Parsial):

Variabel	t hitung	Sig.	Keterangan
Pajak Daerah	4,904	0,000	Berpengaruh signifikan
Retribusi Daerah	-0,293	0,770	Tidak berpengaruh signifikan
Jumlah Penduduk	35,552	0,000	Berpengaruh signifikan

Sumber: Data Diolah, 2025

1. **Pajak Daerah:** Nilai signifikansi 0,000 < 0,05 menunjukkan pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Temuan ini konsisten dengan penelitian Yohana Fransiska Br Sembiring dkk. (2022) dan Rachmi Intan (2018) yang menyimpulkan bahwa pajak daerah berdampak positif terhadap belanja pemerintah daerah. Pajak daerah sebagai komponen terbesar PAD memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan belanja daerah.
2. **Retribusi Daerah:** Nilai signifikansi 0,770 > 0,05 menunjukkan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini disebabkan kontribusi retribusi daerah terhadap total pendapatan daerah masih relatif kecil dan bersifat fluktuatif. Temuan ini sejalan dengan penelitian Vellia Febriani dan Titik Mildawati (2021) serta Cerni Amelia Fauziah dkk. (2023) yang menyatakan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.
3. **Jumlah Penduduk:** Nilai signifikansi 0,000 < 0,05 menunjukkan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Temuan ini konsisten dengan penelitian Paula Cherilina Arrabella Mooy dan Yuliastuti Rahayu (2020) serta Siti Murohah (2019) yang menyimpulkan bahwa jumlah penduduk merupakan determinan penting dalam menentukan besarnya belanja daerah. Pertambahan penduduk meningkatkan kebutuhan pelayanan publik dan infrastruktur.

Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai R Square sebesar 0,929 menunjukkan bahwa 92,9% variasi belanja daerah mampu dijelaskan oleh ketiga variabel independen (pajak daerah, retribusi daerah, dan jumlah penduduk), sedangkan 7,1% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Adjusted R Square sebesar 0,928 memperkuat bahwa model regresi memiliki tingkat ketepatan yang tinggi setelah disesuaikan dengan jumlah variabel independen.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara simultan, pajak daerah, retribusi daerah, dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2019-2023. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan belanja daerah ditentukan oleh kombinasi antara kapasitas fiskal dan kebutuhan masyarakat.
2. Secara parsial, pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Semakin besar penerimaan pajak daerah, semakin kuat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan menyediakan layanan publik. Pajak daerah menjadi sumber utama dalam mendukung kapasitas fiskal daerah.
3. Retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Kontribusi retribusi daerah belum mampu menjadi faktor yang menentukan peningkatan belanja daerah karena perannya masih terbatas dan bersifat fluktuatif.
4. Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Semakin besar jumlah penduduk, semakin tinggi kebutuhan pelayanan publik dan infrastruktur, sehingga mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan alokasi belanja.

DAFTAR PUSTAKA

Ambya. (2023). *Ekonomi Keuangan Daerah*. Bandar Lampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja.

Dahliah. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Penduduk dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Kota Makassar. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 5(2), 2760.

Fauziah, C. A., Wulandari, H. K., & Kharisma, A. S. (2023). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah. *Journal of Law Education and Business*, 1(2), 525.

Febriani, V., & Mildawati, T. (2021). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(1), 16.

Intan, R. (2018). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016. Skripsi.

Matos, L. A. P. de. (2018). Essay on Fiscal Federalism. *National Tax Journal*, 144.

Mooy, P. C. A., & Rahayu, Y. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(11), 1.

Murohah, S. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah (Study kasus di Provinsi Jawa Tengah Periode 2015 sampai 2017). Skripsi.

Oates, W. E. (1972). *Fiscal Federalism*. New York: Harcourt Brace Jovanovich.

Sembiring, Y. F. B., dkk. (2022). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perpajakan*, 5(1), 40-47.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.